



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**SKRIPSI**

**PENGARUH FAKTOR *TAX PAYER* TERHADAP KEBERHASILAN  
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
DI KECAMATAN SUNGAI TARAB**

Oleh:

**WILD A**

**04 153 062**

Mahasiswa program Strata I Jurusan Akuntansi

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Akuntansi*

**PADANG**

**2009**

## ABSTRAK

Keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor *tax payer*. Faktor *tax payer* merupakan faktor yang melekat pada diri wajib pajak dan *uncontrollable* untuk fiskus. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor *tax payer* yaitu kesadaran perpajakan, pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang sanksi denda PBB, pendapatan dan tingkat pendidikan wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kecamatan Sungai Tarab. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kecamatan Sungai Tarab dengan pengambilan sampel menggunakan metode *cluster sampling*. Hasil penelitian menunjukkan secara individu maupun keseluruhan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kecamatan Sungai Tarab. Variabel kesadaran perpajakan, pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang sanksi denda PBB, pendapatan dan tingkat pendidikan wajib pajak secara berturut-turut memiliki nilai signifikansi sebesar 0.009, 0.034, 0.033, 0.019 dan 0.036. Dari keseluruhan variabel independen yang diuji, variabel kesadaran perpajakan merupakan variabel yang paling signifikan berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kecamatan Sungai Tarab.

*Key Word* : *tax payer*, keberhasilan penerimaan PBB

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang sedang membangun, Indonesia membutuhkan banyak dana untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera dapat tercapai.

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan biaya yang sangat banyak. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Waluyo dan Ilyas, 1999). Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna untuk kepentingan bersama.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam APBN yang di buat oleh pemerintah terdapat tiga sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan, yaitu:

1. Penerimaan dari sektor migas ( minyak dan gas ) ;
2. Penerimaan dari sektor pajak ; dan
3. Penerimaan dari sektor bukan pajak.

Dari ketiga sumber penerimaan di atas, penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar negara. Dari tahun ketahun dapat dilihat bahwa penerimaan pajak terus meningkat dan memberi andil yang besar dalam penerimaan negara. Sedangkan penerimaan migas yang dahulu menjadi



andalan penerimaan negara sekarang ini sudah tidak dapat diandalkan lagi, karena sifatnya yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable resources*). Maka setelah berakhirnya era kejayaan migas yang dahulu sebagai penghasil utama penerimaan negara, kini posisinya digantikan oleh pajak yang berperan sebagai primadona baru dalam penerimaan negara.

Untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan itu, maka pemerintah berusaha mendorong partisipasi aktif dari masyarakat untuk menyukseskan pembangunan. Partisipasi masyarakat yang paling nyata dalam pembangunan adalah kewajiban membayar pajak kepada negara yang merupakan wujud kegotongroyongan nasional. Hal ini sesuai dengan definisi pajak menurut Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi diatas jelaslah bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang, mempunyai fungsi penting sebagai salah satu sumber keuangan negara yang akan menunjang suksesnya pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Semakin besar partisipasi masyarakat, semakin besar pula peranannya dalam pembangunan di negaranya, karena pada hakekatnya pajak berasal dari dan untuk masyarakat.

Pajak mempunyai fungsi antara lain (1) Fungsi penerimaan (*budgetter*); Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dimasukannya pajak dalam APBN sebagai

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Faktor *tax payer* merupakan faktor yang melekat pada diri wajib pajak. Kesadaran perpajakan, pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB, pendapatan wajib pajak dan tingkat pendidikan wajib pajak PBB merupakan variabel yang mewakili faktor *tax payer* dan digunakan sebagai alat untuk mengukur pengaruh faktor *tax payer* terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kecamatan Sungai Tarab.
2. Berdasarkan pengujian hipotesis dari regresi linear berganda, dengan menggunakan uji t terhadap variabel independent. Secara individu variabel kesadaran perpajakan, pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB, pendapatan wajib pajak dan tingkat pendidikan wajib pajak PBB mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB di kecamatan Sungai Tarab. Masing-masing variabel secara berturut-turut memiliki nilai signifikansi sebesar 0.009, 0.034, 0.033, 0.019 dan 0.036. Dari seluruh variabel independen yang diuji, variabel kesadaran perpajakan merupakan variabel yang paling signifikan berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di kecamatan Sungai Tarab.
3. Berdasarkan uji F yang dilakukan, terbukti seluruh variabel independen yang mewakili faktor *tax payer* yaitu kesadaran perpajakan, pemahaman



## DAFTAR PUSTAKA

- Atkinson, Edward E. Smith dan Daryl J. Bern (Alih Bahasa Wijaya Kusuma).1994. *Pengantar Psikologi*. Edisi 11, jilid 1. Jakarta: Interaksara
- Hanung, Styaningtyas dan Payamta.1994. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Terhadap Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1993*. Penelitian Berkelompok Dana DRKTahun 1994/ 1995. FE-Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Keputusan Menteri Keuangan No 552/KMK.03/2002. *Perimbangan Hasil Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*
- Mardiasmo. 2000. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- .....2001. *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Nazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nihayah, Idah .2004. *Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib Pajak Perseorangan dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan ( Survei di Pasar Klewer Surakarta, Pasar Benteng Surakarta dan Pasar Beringharjo Yogyakarta)*. Skripsi tidak dipublikasikan. FE- UNS. Surakarta
- Nisa, Hasanatun. 2002. *Hubungan antara Tingkat Pendidikan Wajib Pajak dan Efektifitas Layanan Informasi Perpajakan terhadap Sikap Ketaatan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak di Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jeteng*. Skripsi tidak dipublikasikan. FE-Universitas Muhammadiyah. Surakarta
- Nugroho, Bhuono Agung. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Payamta, aryani dan Rahmawati.1994. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban PBB(Pajak Bumi dan Bangunan)*. Penelitian Berkelompok Dana Tahunan 1994/1995. FE- Universits Sebelas Maret. Surakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2000. *Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Atas Dana Perimbangan*.